




Research Article

Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural Indonesia “ A Conceptual And Social Analysis “

Arna Saskia¹, Rahmad Hidayat², Jamilus³, Kumaidi⁴, Novita Jurniati⁵

1. Program S3 Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: arnasaskia@iaiabsasarolangun.ac.id 
2. Program S3 Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: rahmadhidayat@uinmybatusangkar.ac.id
3. Program S3 Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: jamilus@uinmybatusangkar.ac.id
4. Program S3 Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: kumaidi@unisar.ac.id
5. Program S3 Studi Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
E-mail: novitajurniati25@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2026
Accepted : April 12, 2026

Revised : March 27, 2026
Available online : May 16, 2026

How to Cite: Arna Saskia (2026) “Religious Moderation in Indonesia’s Multicultural Society: A Conceptual and Social Analysis”, *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2268–2284. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3350.

Religious Moderation in Indonesia's Multicultural Society: A Conceptual and Social Analysis

Abstract. Indonesia is a country characterized by a high level of religious, ethnic, and cultural diversity, which necessitates a religious approach capable of maintaining social harmony and cohesion. Religious moderation has emerged as an essential concept in responding to such pluralism by emphasizing balance, tolerance, and justice in understanding and practicing religious teachings. This article aims to examine the concept of religious moderation, its foundations and underlying principles, its core values, objectives and urgency, forms of implementation, as well as the supporting and inhibiting factors within the Indonesian social context. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing scholarly books, peer-reviewed journal articles, and relevant policy documents. The findings indicate that religious moderation is grounded in strong theological, philosophical, and constitutional foundations and plays a strategic role in preventing conflict, strengthening humanitarian values, and maintaining national integration. The implementation of religious moderation requires sustained collaboration among the government, educational institutions, religious leaders, and society. Despite challenges such as radicalism, limited digital literacy, identity politics, and the lack of exemplary leadership, religious moderation remains a fundamental pillar in fostering a peaceful, just, and tolerant society in Indonesia.

Keywords: Religious Moderation, Tolerance, Multiculturalism, Interreligious Harmony, Social Life.

Abstrak. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman agama, suku, dan budaya yang tinggi, sehingga membutuhkan pendekatan keberagaman yang mampu menjaga kerukunan dan harmoni sosial. Moderasi beragama menjadi konsep penting dalam merespons pluralitas tersebut dengan menekankan sikap keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep moderasi beragama, dasar dan landasannya, prinsip-prinsip utama, tujuan dan urgensinya, bentuk implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama dalam hal masyarakat Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, dengan menganalisis buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki dasar teologis, filosofis, dan konstitusional yang kuat, serta berperan strategis dalam mencegah konflik, memperkuat nilai kemanusiaan, dan menjaga integrasi bangsa. Implementasi moderasi beragama memerlukan keterlibatan pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat secara berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan berupa radikalisme, minimnya literasi digital, politik identitas, dan kurangnya keteladanan, moderasi beragama tetap menjadi pilar utama dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan toleran.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Toleransi, Multikulturalisme, Kerukunan Umat Beragama, Kehidupan Sosial.

PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan konsep yang memiliki relevansi tinggi dalam hal keberagaman agama di Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati perbedaan keyakinan dan mengembangkan toleransi sebagai landasan utama dalam membangun kerukunan dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Dalam era globalisasi dan pluralisme agama, moderasi beragama menjadi kunci strategis dalam mencegah konflik antarumat

beragama serta mendorong dialog yang konstruktif antar kelompok keagamaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai sikap normatif yang menekankan toleransi dan saling menghormati, tetapi juga sebagai kerangka praksis sosial yang menentukan kualitas relasi antarumat beragama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat multikultural.

Sejauh ini, kajian-kajian tentang moderasi beragama umumnya menempatkan konsep tersebut sebagai nilai ideal dan instrumen normatif dalam menjaga kerukunan sosial. Berbagai penelitian dan literatur menunjukkan bahwa moderasi beragama berkontribusi dalam memperkuat toleransi, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan kerja sama antarumat beragama. (Syaban 2025) menegaskan bahwa moderasi beragama mampu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat yang heterogen. Sejalan dengan itu, (Yahya et al. 2025) menyoroti peran moderasi beragama dalam membangun jembatan komunikasi melalui dialog antaragama yang konstruktif dan berorientasi pada saling pengertian. Namun, sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada pendekatan deskriptif dan konseptual, sehingga belum secara memadai mengungkap bagaimana moderasi beragama dioperasionalkan sebagai praktik sosial dalam ruang interaksi masyarakat yang majemuk.

Dalam praktiknya, moderasi beragama di Indonesia telah menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai praktik moderasi beragama telah diimplementasikan melalui kegiatan keagamaan dan program sosial yang melibatkan beragam kelompok agama. Penelitian (Setyaningsih et al. 2025) menunjukkan bahwa moderasi beragama mampu mengurangi ketegangan sosial dan memperkuat rasa saling menghormati dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah moderasi beragama sebagai hasil interaksi antara nilai, aktor sosial, dan konteks multikultural yang terus berubah. Pemahaman dan implementasi moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai upaya menjaga persatuan, menciptakan kehidupan yang damai, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman keyakinan dan budaya.

Kebaruan lain yang diangkat dalam artikel ini adalah integrasi moderasi beragama dengan tantangan ruang digital. Di era digital, ruang maya telah menjadi arena baru dalam produksi dan distribusi makna keagamaan. Moderasi beragama menghadapi tantangan sekaligus peluang baru di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital. Digital space tidak hanya berfungsi sebagai media untuk penyebaran informasi tetapi juga sebagai tempat untuk menciptakan makna keagamaan. Namun, informasi palsu, ujaran kebencian, dan narasi radikal dapat menyebar (Mubarok and Sunarto 2024). Sebagai pengguna utama platform digital, generasi muda menjadi sasaran utama dari berbagai narasi keagamaan, baik moderat maupun ekstrem. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan metode dakwah digital yang berbasis nilai-nilai moderasi beragama, seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), dan *tawazun* (keseimbangan), sehingga ruang maya tidak menjadi medium polarisasi tetapi sebaliknya menjadi wahana untuk mengajar dan meningkatkan harmoni sosial. Perspektif ini memperluas kajian moderasi beragama yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada ruang offline.

Sejak dini, pendidikan memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, terutama melalui kurikulum dan praktik pembelajaran yang inklusif. Misalnya, kursus seperti Pendidikan Pancasila, Ilmu Perbandingan Agama, dan Pendidikan Agama Islam menekankan akhlak mulia dan penghargaan terhadap keberagaman untuk mendorong integrasi moderasi beragama di perguruan tinggi (Nisa et al. 2025). Pendekatan pembelajaran tersembunyi, di mana prinsip moderasi ditanamkan melalui interaksi sosial, budaya kampus, dan keteladanan, terbukti efektif dalam membangun karakter siswa yang toleran dan antiradikal. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah strategi pendidikan dan wacana teologis untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa moderasi beragama tidak cukup diajarkan secara tekstual, melainkan harus dihidupkan melalui praktik sosial dan keteladanan, terutama di lingkungan pendidikan tinggi dan generasi muda.

Selain itu, moderasi beragama penting untuk kehidupan bangsa dan umat beragama secara keseluruhan. Moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika adalah bukti komitmen terhadap Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan (Mubarok and Sunarto 2024). Implementasi nilai-nilai ini mendorong orang untuk taat pada ajaran agamanya dan menghormati hak orang lain untuk beragama. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya melindungi dari ekstremisme tetapi juga membantu membangun masyarakat yang adil, damai, dan berkeadaban, sesuai dengan visi Islam rahmatan lil'alamin. Secara konseptual, moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai upaya menempatkan ajaran agama dalam kerangka keseimbangan antara teks dan konteks. Pemahaman keagamaan yang kontekstual memungkinkan ajaran agama tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan nilai-nilai normatifnya. Dengan ini, agama tidak diposisikan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai kekuatan moral yang mampu memperkuat solidaritas sosial dan kemanusiaan universal.

Konteks kebijakan publik, moderasi beragama telah diutamakan sebagai agenda nasional untuk menjaga stabilitas sosial dan integrasi bangsa. Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan strategi kebudayaan dalam mengelola keberagaman melalui penguatan nilai keadilan, keseimbangan, dan toleransi dalam kehidupan beragama (Kementrian Agama, 2019). Kebijakan ini mencerminkan kesadaran negara bahwa harmoni sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan yang moderat.

Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama juga dipahami sebagai strategi kebudayaan dalam menjaga keberlanjutan nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan integrasi nasional. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menjadikan moderasi beragama sebagai agenda nasional (Kementrian Agama, 2019). Menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya pendekatan kultural dan edukatif dalam mengelola keberagaman. Namun, artikel ini melampaui pendekatan kebijakan dengan menekankan bagaimana nilai-nilai tersebut dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat secara konkret.

Moderasi beragama memiliki signifikansi global dalam merespons meningkatnya konflik berbasis identitas dan agama di berbagai belahan dunia. Studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan moderasi dalam keberagamaan mampu menjadi solusi alternatif dalam membangun perdamaian berkelanjutan dan dialog lintas iman. Dalam hal ini, pengalaman Indonesia dalam mempraktikkan moderasi beragama dapat menjadi model penting bagi negara-negara multikultural lainnya. Dengan demikian pembahasan mengenai moderasi beragama menjadi sangat relevan dan strategis. Kajian ini tidak hanya bertujuan memperkuat pemahaman konseptual mengenai moderasi beragama, tetapi juga menegaskan urgensinya sebagai fondasi etis, sosial, dan kebangsaan dalam menjaga harmoni, persatuan, dan keadilan sosial di tengah realitas keberagaman agama dan budaya di Indonesia.

Dengan demikian, kebaruan substansi artikel ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan konsep moderasi beragama dengan realitas sosial masyarakat multikultural Indonesia, pendidikan, dan dinamika digital secara simultan. Kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis tentang moderasi beragama, tetapi juga menawarkan perspektif analitis mengenai bagaimana moderasi beragama berfungsi sebagai fondasi etis, sosial, dan kebangsaan dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban, serta relevan sebagai model bagi masyarakat multikultural di tingkat global.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Penelitian mengenai moderasi beragama di Indonesia umumnya menekankan aspek konseptual dan normatif, khususnya terkait definisi, prinsip, dan urgensinya dalam menjaga kerukunan masyarakat multikultural. Sebagian besar literatur memosisikan moderasi beragama sebagai nilai ideal dan instrumen kebijakan negara untuk mencegah ekstremisme dan konflik sosial. Namun, kajian-kajian tersebut masih terbatas dalam menguraikan secara analitis bagaimana moderasi beragama diimplementasikan secara konkret dalam kehidupan sosial masyarakat lintas agama (Azra 2019; Kementerian Agama 2019). Moderasi beragama umumnya diposisikan sebagai nilai ideal sekaligus instrument negara dalam merespons ekstremisme, radikalisme, dan konflik berbasis agama.

Namun demikian, kesenjangan signifikan masih terlihat pada minimnya kajian yang menguraikan implementasi moderasi beragama secara empiris dan kontekstual dalam kehidupan sosial masyarakat lintas agama. Sebagian besar penelitian belum menggambarkan secara mendalam bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dipraktikkan dalam interaksi sosial sehari-hari, baik dalam ruang keluarga, komunitas lokal, maupun relasi antarumat beragama (Ali 2021). Akibatnya, moderasi beragama sering kali berhenti pada tataran wacana normative dan belum sepenuhnya dipahami sebagai praktik sosial yang dinamis.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung berorientasi pada peran negara dan kebijakan publik, seperti regulasi, program kementerian, dan narasi resmi pemerintah, sehingga kurang memberi ruang pada perspektif masyarakat akar rumput (grassroots). Padahal, efektivitas moderasi beragama sangat ditentukan oleh respons, partisipasi, dan negosiasi sosial yang terjadi di tingkat komunitas, termasuk

peran tokoh agama, pendidik, dan aktor sosial lokal (Hilmy, 2020). Kesenjangan ini menyebabkan terbatasnya pemahaman mengenai bagaimana moderasi beragama dimaknai dan diinternalisasi oleh masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam.

Kesenjangan lainnya tampak pada pendekatan penelitian yang masih bersifat deskriptif, terutama dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama. Sebagian studi hanya memaparkan faktor-faktor tersebut tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi moderasi beragama dalam konteks sosial yang plural dan berlapis (Ali, 2021). Akibatnya, hubungan antara faktor struktural, kultural, dan institusional dengan efektivitas moderasi beragama belum dianalisis secara komprehensif.

Lebih jauh, integrasi antara moderasi beragama, pendidikan, literasi keagamaan, dan tantangan era digital masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Padahal, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan ruang baru bagi penyebaran narasi keagamaan yang bersifat eksklusif, intoleran, bahkan ekstrem (Rohman, 2022). Minimnya kajian yang mengaitkan moderasi beragama dengan dinamika digital menunjukkan adanya celah penelitian terkait bagaimana moderasi beragama dapat beradaptasi dan berfungsi secara berkelanjutan di tengah arus disrupsi informasi.

Masih sangat terbatas penelitian yang mengintegrasikan peran pendidikan, literasi keagamaan, dan transformasi digital dalam kerangka moderasi beragama. Padahal, era digital telah menghadirkan tantangan serius berupa diseminasi wacana keagamaan yang eksklusif, intoleran, dan ekstrem melalui media sosial dan platform digital. Minimnya kajian yang mengaitkan moderasi beragama dengan ekologi media digital menunjukkan adanya kekosongan analisis terhadap bagaimana moderasi beragama dapat dikontekstualisasikan secara adaptif dan berkelanjutan di tengah perubahan sosial yang cepat.

Kesenjangan lainnya juga terlihat pada minimnya kajian yang mengintegrasikan peran pendidikan, literasi keagamaan, dan tantangan era digital dalam kerangka moderasi beragama. Padahal, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham ekstrem dan intoleran yang memerlukan pendekatan moderasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis komprehensif mengenai tujuan, urgensi, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia.

Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang mengintegrasikan analisis konseptual moderasi beragama dengan realitas sosial multikultural Indonesia secara simultan. Banyak studi berhenti pada aspek teoretis atau sebaliknya terlalu kontekstual tanpa landasan konseptual yang kuat. Kesenjangan ini membuka ruang bagi penelitian yang mampu menghubungkan kerangka konseptual moderasi beragama dengan praktik sosial konkret dalam masyarakat multikultural.

Berdasarkan berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis secara komprehensif tujuan, urgensi, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambat moderasi beragama, dengan menekankan interaksi antara konsep, praktik sosial, pendidikan, dan

tantangan era digital dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia dan diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan moderasi beragama yang kontekstual dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan sikap dan cara pandang dalam beragama yang menekankan keseimbangan antara keyakinan terhadap ajaran agama yang dianut dengan sikap menghormati keberagaman keyakinan orang lain. Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama, melainkan mengarahkan penganutnya agar tidak bersikap ekstrem, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme berlebihan, dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama (Kementrian Agama 2019).

(Azra 2019) menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan upaya menempatkan agama sebagai kekuatan moral yang membimbing kehidupan manusia secara damai, toleran, dan berkeadilan. Dalam hal ini, yang dimoderasi bukanlah ajaran agama itu sendiri, melainkan cara pandang, pemahaman, serta perilaku keagamaan manusia dalam merespons perbedaan sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi terciptanya harmoni sosial dan kehidupan berbangsa yang rukun di tengah keberagaman.

Pemikiran Azra tersebut menegaskan bahwa agama sejatinya memiliki fungsi transformatif dalam membangun peradaban yang beradab dan berkeadilan. Ketika agama dipahami secara moderat, nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat teraktualisasi dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif berpotensi melahirkan sikap intoleran dan konflik horizontal yang merusak kohesi sosial (Kementrian Agama 2019).

(Rahman 2020) menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki dimensi intelektual dan sosial, di mana individu didorong untuk memahami teks-teks keagamaan secara mendalam, kritis, dan kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Pemahaman agama yang demikian memungkinkan nilai-nilai keagamaan hadir sebagai solusi atas persoalan sosial tanpa menimbulkan perpecahan. Moderasi beragama dengan demikian berfungsi menjaga keseimbangan antara keimanan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Dimensi intelektual dalam moderasi beragama mendorong umat beragama untuk tidak memahami teks keagamaan secara literal dan ahistoris, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Pendekatan ini penting agar agama tetap relevan dan mampu menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan nilai-nilai esensialnya. Sementara itu, dimensi sosial moderasi beragama menekankan pentingnya interaksi yang harmonis antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat (Rahman 2020).

Moderasi beragama juga dipahami sebagai strategi kebudayaan dan spiritual untuk memperkuat kohesi sosial bangsa. Seperti halnya Indonesia yang multikultural, multietnis, dan multiagama, moderasi beragama menjadi instrumen

penting untuk mencegah konflik horizontal serta memperkuat persatuan nasional (Syafii Maarif 2019).

Pandangan Syafii Maarif, moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari konsep kebangsaan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama menjadi landasan etis dan moral dalam merawat kebinekaan serta mencegah politisasi agama yang berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara sistematis melalui pendidikan, dakwah, kebijakan publik, dan keteladanan para pemuka agama (Syafii Maarif 2019).

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap keseimbangan dalam memahami, mengamalkan, dan mengekspresikan ajaran agama dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, toleransi, dan kemanusiaan universal. Moderasi beragama bukanlah bentuk kompromi terhadap kebenaran ajaran agama, melainkan penerapan nilai-nilai agama secara kontekstual, bijaksana, dan damai guna mewujudkan harmoni sosial di tengah keberagaman (Kementerian Agama RI 2019; Rahman 2020).

Dasar dan Landasan Moderasi Beragama

Moderasi beragama memiliki landasan yang kuat secara teologis, filosofis, dan konstitusional. Secara teologis, setiap agama pada dasarnya mengajarkan nilai keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam Islam, prinsip wasathiyah menjadi dasar utama moderasi, yang bermakna berada di tengah-tengah dan tidak bersikap ekstrem ke arah mana pun (Amin 2019).

Prinsip wasathiyah dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai sikap kompromi, melainkan sebagai manifestasi dari keadilan dan kebijaksanaan dalam beragama. Konsep ini menempatkan umat beragama pada posisi yang proporsional dalam menjalankan ajaran agama sekaligus berinteraksi dengan realitas sosial yang plural. Keberagaman yang moderat mencerminkan kemampuan individu untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan etika sosial, sehingga agama dapat berfungsi sebagai sumber kedamaian dan kemaslahatan bersama (Amin 2019).

Selain dalam Islam, nilai-nilai moderasi juga ditemukan dalam ajaran agama-agama lain yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bersifat universal dan menjadi titik temu antaragama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Dengan demikian, landasan teologis moderasi beragama tidak hanya bersumber dari satu tradisi keagamaan, melainkan merupakan nilai bersama yang hidup dalam berbagai sistem kepercayaan (Kementerian Agama, 2019).

Secara filosofis, moderasi beragama berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang menempatkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia, menjadi dasar filosofis yang memperkuat praktik moderasi dalam kehidupan beragama dan berbangsa (Kementrian Agama 2019).

Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan bahwa keberagaman harus berjalan seiring dengan semangat persatuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap nilai ketuhanan,

sementara sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi jembatan antara komitmen keagamaan dan tanggung jawab kebangsaan, sehingga tidak terjadi pertentangan antara identitas agama dan identitas nasional (Kementrian Agama 2019).

Secara filosofis pula, moderasi beragama mencerminkan etika sosial bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, toleransi, dan gotong royong. Nilai-nilai ini menuntut umat beragama untuk tidak memaksakan keyakinannya kepada orang lain, melainkan membangun kehidupan bersama yang dilandasi sikap saling menghormati. Oleh karena itu, moderasi beragama tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk (Syafii Maarif 2019).

Sementara itu, secara konstitusional, moderasi beragama memiliki pijakan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 29 ayat (2) menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan mencegah sikap diskriminatif (Rohman 2020).

Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak beragama seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, moderasi beragama berfungsi sebagai pendekatan strategis untuk memastikan kebebasan beragama berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan prinsip konstitusi ke dalam praktik kehidupan sosial yang damai dan berkeadilan (Rohman 2020).

Dasar dan landasan moderasi beragama yang mencakup aspek teologis, filosofis, dan konstitusional menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar wacana normatif, melainkan memiliki legitimasi yang kuat baik dari ajaran agama, nilai-nilai kebangsaan, maupun kerangka hukum negara. Ketiga landasan tersebut saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis, adil, dan berkeadaban di tengah masyarakat Indonesia yang plural (Kementrian Agama 2019).

Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama dibangun di atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah (*syura*), dan cinta tanah air.

Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai kerangka etis dan praktis yang mengarahkan umat beragama agar tidak terjebak pada sikap ekstrem, baik yang bersifat radikal maupun liberal. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang plural, prinsip-prinsip moderasi beragama menjadi pilar penting untuk menjaga kerukunan, stabilitas sosial, dan keharmonisan antarumat beragama.

Prinsip keadilan menuntut setiap individu untuk bersikap adil terhadap diri sendiri maupun orang lain tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan agama atau aliran. Keadilan dalam moderasi beragama tidak dimaknai sebagai penyamarataan

keyakinan, melainkan menempatkan setiap individu dan kelompok pada posisi yang semestinya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam praktik kehidupan beragama, prinsip keadilan mendorong sikap tidak memaksakan keyakinan, menolak kekerasan, serta menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (Anwar 2019). Prinsip keadilan berperan sebagai landasan etis agar moderasi beragama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Dengan menjunjung keadilan, umat beragama didorong untuk menghargai perbedaan pandangan, baik di dalam satu agama maupun antaragama, sehingga tercipta kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadaban (Kementrian Agama 2019).

Prinsip keseimbangan mengajarkan proporsionalitas antara kehidupan dunia dan akhirat, serta keterbukaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Prinsip ini menegaskan bahwa keberagamaan yang moderat tidak mengabaikan tanggung jawab sosial maupun spiritual. Individu yang moderat mampu menjalankan ajaran agama secara konsisten sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial modern (Rahman 2020).

Konteks sosial, prinsip tawazun mencegah umat beragama terjebak pada sikap ekstrem yang menolak perubahan maupun pada materialisme yang mengabaikan nilai spiritual. Keseimbangan ini memungkinkan agama berfungsi sebagai pedoman moral yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi (Rahman 2020).

Prinsip toleransi menekankan sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan tanpa harus kehilangan identitas keagamaan. Toleransi dalam moderasi beragama bukanlah relativisme yang menyamakan semua ajaran, melainkan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Sikap toleran memungkinkan terbangunnya ruang sosial yang aman dan kondusif bagi dialog lintas iman. Melalui penerapan prinsip toleransi, perbedaan dipandang sebagai realitas sosial yang memperkaya kehidupan bersama, bukan sebagai ancaman. Dengan demikian, toleransi berperan penting dalam mencegah konflik berbasis agama dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat multikultural (Sutrisno 2021).

Prinsip musyawarah menjadi sarana penyelesaian perbedaan pandangan secara damai dan demokratis. Musyawarah mencerminkan nilai kebersamaan, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Dalam kerangka moderasi beragama, musyawarah digunakan sebagai mekanisme dialog untuk mencari titik temu atas perbedaan yang muncul dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Melalui musyawarah, perbedaan tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik, melainkan dikelola secara konstruktif demi mencapai kemaslahatan bersama. Prinsip ini memperkuat budaya dialog dan mendorong penyelesaian masalah secara partisipatif, sehingga memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman (Hidayat 2021).

Sementara itu, prinsip cinta tanah air menegaskan bahwa pengamalan ajaran agama harus sejalan dengan komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Prinsip ini menempatkan nasionalisme sebagai bagian integral dari pengamalan nilai-nilai keagamaan. Seorang yang moderat tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap stabilitas sosial, perdamaian, dan keutuhan

negara. Cinta tanah air dalam moderasi beragama menjadi benteng terhadap ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan menjunjung prinsip ini, umat beragama didorong untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa serta menjaga harmoni sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kementrian Agama 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini berada pada pengkajian konseptual dan analitis mengenai moderasi beragama. Metode studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menganalisis gagasan, konsep, dan kebijakan moderasi beragama secara mendalam berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan resmi pemerintah, khususnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap tema moderasi beragama, pluralisme, toleransi, pendidikan karakter, serta dinamika sosial-keagamaan di (Azra 2019; Kementrian Agama 2019).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan mengkaji karya-karya ilmiah yang membahas konsep moderasi beragama, implementasinya dalam bidang pendidikan, sosial, pemerintahan, dan kehidupan keagamaan, serta kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Literatur yang digunakan mencakup pemikiran akademik dan hasil penelitian yang relevan dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema, konsep kunci, serta pola-pola pemikiran yang muncul dalam literatur terkait moderasi beragama. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori tujuan dan urgensi moderasi beragama, bentuk implementasi moderasi beragama, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji silang berbagai referensi dari penulis dan lembaga yang berbeda. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bersifat subjektif atau normatif semata, melainkan didukung oleh pandangan akademik dan temuan empiris dari berbagai kajian sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai sebagai dasar dalam pembahasan moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi temuan utama terkait tujuan dan urgensi moderasi beragama, implementasinya dalam kehidupan sosial, serta faktor pendukung dan

penghambat penerapannya di Indonesia. Temuan tersebut diperoleh melalui hasil analisis literatur ilmiah dan dokumen kebijakan yang diklasifikasikan berdasarkan tema moderasi beragama dan dinamika sosial-keagamaan dalam masyarakat multikultural.

Tujuan dan Urgensi Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kajian teoretis, moderasi beragama bertujuan untuk membangun keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama agar umat tidak terjebak dalam sikap ekstrem, baik yang bersifat radikal maupun liberal. Melalui pendekatan moderasi beragama, masyarakat diarahkan untuk mengembangkan sikap adil, toleran, serta menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial dan keagamaan (Azra 2019).

Tujuan tersebut menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya untuk mereduksi ajaran agama, melainkan menempatkan nilai-nilai agama secara proporsional dan bijaksana dalam realitas sosial yang majemuk. Dengan sikap moderat, umat beragama diharapkan mampu mengelola perbedaan secara konstruktif dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi keagamaan yang bersifat eksklusif dan konfrontatif.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hal Indonesia yang plural, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama. Moderasi beragama berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga integrasi bangsa serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika (Hidayat 2021). Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa moderasi beragama berkontribusi dalam pembentukan karakter umat beragama yang memiliki cara pandang terbuka dan rasional dalam memahami ajaran agama sesuai dengan konteks sosial dan budaya modern (Syahputra 2024).

Konteks kebangsaan, tujuan moderasi beragama juga diarahkan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah keberagaman identitas agama, budaya, dan etnis. Dengan menjadikan moderasi sebagai pedoman bersama, masyarakat dapat membangun relasi sosial yang inklusif dan memperkuat komitmen terhadap persatuan nasional (Hidayat 2020). Hal ini menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan kehidupan berbangsa.

Moderasi beragama bertujuan membentuk umat beragama yang mampu memahami ajaran agama secara kontekstual tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ketuhanan. Sikap terbuka dan rasional dalam beragama memungkinkan ajaran agama hadir sebagai solusi atas persoalan sosial kontemporer, bukan sebagai sumber konflik atau pembenaran kekerasan (Ali 2021). Dengan demikian, moderasi beragama mendorong aktualisasi nilai agama yang selaras dengan dinamika masyarakat modern.

Berdasarkan hasil pembahasan, urgensi moderasi beragama semakin meningkat di tengah dinamika globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan penyebaran paham ekstremisme berbasis agama. Moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam memperkuat literasi keagamaan masyarakat agar mampu menyaring informasi serta memahami ajaran agama secara proporsional dan bertanggung jawab (Arrofi 2024; Nisa et al. 2025). Arus informasi digital yang cepat dan tidak terfilter sering kali dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks keagamaan, serta ideologi ekstrem yang mengancam kohesi sosial. Dalam situasi ini,

moderasi beragama berperan sebagai pendekatan preventif untuk meredam potensi konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa moderasi beragama memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama (Gule 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan beradab, serta mendorong umat beragama untuk menjunjung tinggi martabat manusia tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Urgensi moderasi beragama juga tampak dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam dunia pendidikan, generasi muda diarahkan untuk memiliki sikap toleran, menghargai perbedaan, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan terbukti menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang berkeadaban dan antiradikalisme (Setyaningsih et al. 2025).

Implementasi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sosial

Berdasarkan hasil analisis, implementasi moderasi beragama merupakan upaya konkret dalam menerapkan nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya dipahami sebagai posisi tengah secara normatif, tetapi juga sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang diwujudkan dalam kehidupan sosial (Kementrian Agama 2019).

Bidang pendidikan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama dilakukan melalui integrasi nilai toleransi dan kebinekaan dalam kurikulum serta melalui keteladanan guru sebagai agen perubahan. Pendidikan yang mengedepankan moderasi beragama terbukti berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu berdialog secara konstruktif (Hidayat 2021).

Sementara itu, berdasarkan hasil kajian pada lingkungan sosial dan pemerintahan, moderasi beragama diwujudkan melalui kebijakan publik yang adil dan inklusif, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari kebijakan publik yang sistematis (Kementrian Agama 2019).

Kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat, hasil analisis menunjukkan bahwa moderasi beragama tercermin dalam sikap saling menghormati antarumat beragama, dialog lintas agama, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial lintas komunitas. Dialog antaragama terbukti menjadi sarana efektif dalam mengurangi prasangka dan memperkuat saling pengertian di tengah masyarakat multikultural (Albana 2023; Risfaisal and Haniah 2022).

Berdasarkan hasil pembahasan, implementasi moderasi beragama memerlukan penguatan literasi keagamaan dan literasi digital agar masyarakat mampu menghadapi arus informasi yang cepat serta menghindari penyebaran paham ekstrem berbasis media digital (Hidayat 2021). Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek teologis, sosial, budaya, dan kebijakan publik menjadi kunci keberhasilan moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural (Azra 2020).

Selain aspek-aspek tersebut, implementasi moderasi beragama juga menuntut adanya internalisasi nilai secara berkelanjutan dalam ruang-ruang sosial informal, seperti keluarga dan komunitas lokal. Keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pertama dalam menanamkan sikap toleransi, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Pola pengasuhan yang dialogis dan terbuka terhadap perbedaan terbukti mampu membentuk karakter moderat sejak usia dini (Sutrisno 2021). Moderasi beragama diperkuat melalui praktik kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial lintas agama. Nilai-nilai budaya tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang efektif dalam meredam potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat majemuk (Johnson 2015). Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya beroperasi pada level normatif-institusional, tetapi juga hidup dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat.

Implementasi moderasi beragama juga berkaitan erat dengan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai figur rujukan. Keteladanan yang ditampilkan melalui ceramah, sikap, dan perilaku tokoh agama berpengaruh signifikan dalam membentuk cara pandang umat terhadap perbedaan. Tokoh agama yang mengedepankan narasi damai, keadilan, dan kemanusiaan berkontribusi besar dalam memperkuat sikap keberagamaan yang inklusif (Hidayat 2021; Brown 2018).

Implementasi moderasi beragama di era digital semakin menuntut kecakapan masyarakat dalam menghadapi ruang publik virtual. Media sosial sering kali menjadi arena penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, dan paham keagamaan ekstrem. Oleh karena itu, penguatan literasi digital berbasis nilai moderasi menjadi bagian integral dari strategi implementasi moderasi beragama, agar masyarakat mampu bersikap kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi serta menyebarkan informasi keagamaan. Keberhasilan implementasi moderasi beragama memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa moderasi beragama tidak berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program, regulasi, dan praktik sosial yang berkelanjutan (Kementrian Agama 2019; Azra 2020).

Faktor Pendukung dan Penghambat Moderasi Beragama

Berdasarkan hasil analisis, keberhasilan implementasi moderasi beragama dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi pemahaman keagamaan yang inklusif dan terbuka terhadap perbedaan (Mahfud, M. D 2020), pendidikan serta literasi keagamaan yang berimbang antara aspek normatif dan sosial (Arrofi 2024), dukungan kebijakan pemerintah dan peran lembaga keagamaan (Mahfud, 2020), serta penguatan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional seperti gotong royong dan musyawarah (Sutrisno 2021).

Pemahaman keagamaan yang inklusif menjadi fondasi utama dalam membangun sikap moderat karena memungkinkan umat beragama menerima keragaman tafsir dan praktik keagamaan sebagai realitas sosial yang tidak terpisahkan. Sikap ini mendorong terciptanya relasi sosial yang harmonis dan mencegah munculnya klaim kebenaran tunggal yang berpotensi memicu konflik (Azra 2019).. Selain itu, pendidikan dan literasi keagamaan berperan strategis dalam membentuk pola pikir umat yang kritis, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi ekstrem. Pendidikan agama yang mengintegrasikan

nilai normatif dengan realitas sosial dinilai efektif dalam menanamkan sikap toleran dan bertanggung jawab dalam kehidupan beragama (Huda 2021).

Dukungan kebijakan pemerintah serta peran aktif lembaga keagamaan juga menjadi faktor pendukung penting dalam penguatan moderasi beragama. Melalui regulasi, program strategis, dan fasilitasi dialog lintas agama, pemerintah berkontribusi dalam menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi praktik keberagamaan yang damai dan inklusif (Mahfud 2020). Di sisi lain, penguatan budaya lokal dan kearifan tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati berfungsi sebagai modal sosial yang memperkuat moderasi beragama di tingkat komunitas. Nilai-nilai tersebut telah lama menjadi karakter masyarakat Indonesia dan relevan dalam menjaga keseimbangan serta keharmonisan sosial (Suharto 2022).

Sebaliknya, hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat dalam penerapan moderasi beragama. Faktor tersebut antara lain berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme ideologis akibat pemahaman agama yang literal dan sempit (Anwar 2020), rendahnya literasi digital dan keagamaan yang memicu penyebaran hoaks serta ujaran kebencian bernuansa agama (Albana 2023) politisasi agama dalam bentuk politik identitas yang memperdalam polarisasi sosial (Anwar 2020), serta kurangnya keteladanan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menampilkan sikap moderat dan inklusif (Hidayat 2021).

Radikalisme dan ekstremisme ideologis menjadi penghambat serius karena cenderung menolak pluralitas dan dialog antarumat beragama. Pemahaman agama yang bersifat tekstual dan terlepas dari konteks sosial sering kali melahirkan sikap eksklusif serta justifikasi kekerasan atas nama agama (Latief 2019). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital dan keagamaan masyarakat di era media sosial, di mana informasi keagamaan yang tidak valid mudah tersebar luas dan memicu kesalahpahaman serta konflik horizontal (Fauzi 2021).

Selain itu, politisasi agama melalui politik identitas turut memperdalam fragmentasi sosial. Ketika agama digunakan sebagai alat mobilisasi politik, nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi sumber kedamaian justru berubah menjadi sarana legitimasi konflik dan polarisasi masyarakat (Anwar 2020). Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya keteladanan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peran tokoh publik sangat menentukan dalam membentuk sikap umat. Ketika mereka gagal menampilkan sikap moderat, adil, dan inklusif, maka pesan moderasi beragama sulit diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat luas (Hidayat 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan konsep fundamental yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Moderasi beragama memiliki landasan yang kuat secara teologis, filosofis, dan konstitusional, serta berfungsi sebagai pedoman dalam membangun kehidupan beragama yang inklusif dan harmonis. Prinsip-prinsip moderasi beragama, seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, musyawarah, dan cinta tanah air, menjadi nilai kunci dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Tujuan dan urgensi moderasi beragama terletak pada perannya dalam mencegah konflik keagamaan, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, serta membentuk karakter bangsa yang toleran dan berkeadaban. Implementasi moderasi beragama memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat melalui pendidikan, kebijakan publik, dialog antaragama, serta penguatan literasi keagamaan dan digital. Meskipun terdapat faktor penghambat seperti radikalisme, rendahnya literasi digital, politik identitas, dan kurangnya keteladanan tokoh agama, moderasi beragama tetap menjadi pilar strategis dalam membangun masyarakat Indonesia yang damai, adil, dan berkeadilan sosial di tengah keberagaman agama dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, Hasan. 2023. “Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama Di Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9(1):49–64. doi:10.18784/smart.v9i1.1849.
- Ali, M. 2021. *Moderasi Beragama Dan Tantangan Kehidupan Modern*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press.
- Amin, M. 2019. *Moderasi Beragama Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Anwar, M. 2019. *Moderasi Beragama: Konsep Dan Implementasi Dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, M. 2020. *Politik Identitas Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arrofi, Miftakhul Huda. 2024. “Systematic Literature Review (SLR): Implementasi Moderasi Beragama Di Sekolah Dasar.” *Literasi : Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 4(2):79–114. doi:10.22515/literasi.v4i2.10977.
- Azra, A. 2019. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azra, A. 2020. *Moderasi Beragama Dalam Konteks Keindonesiaan*. Jakarta: Kencana.
- Fahrul Rozi, & Syafik Ubaidila. (2025). Implementation of Religious Moderation Values at SMAN 6 Kediri. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(4), 481–492. <https://doi.org/10.61166/values.v2i4.105>
- Gule, Yosefo. 2025. “The Role of Religious Moderation in Enhancing Social Harmony and Interfaith Tolerance among University Students.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 17(1):611–22. doi:10.37680/qalamuna.v17i1.7101.
- Hidayat, A. 2021. *Nilai-Nilai Musyawarah Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Juhairiyah, J., Saiful Hadi, Dina Kamilia, & Fenny Erdiyani. (2026). Problems of Islamic Religious Education in a Multicultural Environment: Analysis of Challenges and Learning Strategies. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 91–99. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v3i1.143>
- Kementrian Agama. 2019. “TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA.” P. 25 in. Jakarta: Kementrian Agama.
- Mahfud, M. D. 2020. *Moderasi Beragama Dan Penguatan Kebangsaan*. Jakarta:

- Kementrian Agama.
- Mubarok, Akbar Rizquni, and Sunarto Sunarto. 2024. “Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang.” *Journal of Islamic Communication Studies* 2(1):1–11. doi:10.15642/jicos.2024.2.1.1-11.
- Nisa, C. K., N. S. A. Putri, I. Hasanudin, and F. M. Nazib. 2025. “Peran Pendidikan Dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa.” *Advances In Education Journal* 1(4):288–302.
- Rahman, F. 2020. *Moderasi Beragama Dalam Konteks Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Risfaisal, Risfaisal, and St Haniah. 2022. “Implementasi Nilai Agama Dan Budaya Dalam Upaya Memperkuat Moderasi Beragama Di Sekolah Adat Ammatoa Kajang.” *Potret Pemikiran* 26(2):213–23. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP>.
- Rohman, A. 2020. *Moderasi Beragama: Pilar Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Setyaningsih, Rina, Devi Setiawan, Dibyo Prabowo, Laila Mayasari, Masdinar Julaila, and Muzaim. 2025. “Moderasi Beragama Sebagai Strategi Pencegahan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan Islam.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4(1):6280–84. doi:10.31004/jerkin.v4i1.2417.
- Sutrisno, E. 2021. *Toleransi Dan Pluralisme Dalam Moderasi Beragama*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Syaban, Abdul Karim. 2025. “The Importance of Religious Moderation in Strengthening Interfaith Brotherhood in Multicultural Societies.” *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 3(1):12–20. doi:10.59923/spiritus.v3i1.518.
- Syafii Maarif, A. 2019. *Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan Dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Syahputra, Ali. 2024. “JEMBATAN ATAU TEMBOK: TANTANGAN MODERASI BERAGAMA DALAM MEDIA SOSIAL.” *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama* 4(1):93–108. doi:10.32332/moderatio.v4i1.9068.
- Yahya, Mohammad, Halim Soebahar, Moh. Chotib, and Muhammad Noor Harisuddin. 2025. “Pendidikan Islam Dan Penguatan Moderasi Beragama: Peran Dan Tantangan Dalam Konteks Global.” *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy* 2(1):127–35. doi:10.64431/edushopia.v2i1.205.